



# RENCANA STRATEGIS

2025-2029

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



KABUPATEN REMBANG

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renstra BPBD) Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai salah satu bentuk implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan merupakan penjabaran dari visi, misi, serta arah kebijakan Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029, ke dalam rencana operasional perangkat daerah di bidang penanggulangan bencana.

Renstra BPBD ini disusun dengan pendekatan teknokratik dan berbasis pada pencapaian hasil, dengan memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang terukur melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK). Selain itu, dokumen ini juga mempertimbangkan dinamika penanggulangan bencana, perkembangan kebijakan nasional dan daerah, isu-isu strategis kebencanaan, serta potensi ancaman dan risiko bencana yang relevan dengan kondisi wilayah Kabupaten Rembang.

Dokumen Renstra ini menjadi pedoman bagi BPBD Kabupaten Rembang dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi program serta kegiatan penanggulangan bencana selama lima tahun ke depan. Dengan adanya dokumen ini diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD dapat berjalan secara efektif, terarah, dan sinergis dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang tangguh bencana, aman, dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari kalangan perangkat daerah, akademisi, mitra kerja, dunia usaha, organisasi masyarakat, maupun pihak lainnya yang telah memberikan masukan, data, serta dukungan dalam proses perencanaan. Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, serta mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Rembang yang semakin tangguh, siap siaga, dan sejahtera dalam menghadapi ancaman bencana.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan dalam upaya kita bersama membangun Kabupaten Rembang yang aman bencana dan berkelanjutan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	8
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	8
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	8
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan .....	50
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan.....	50
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	51
2.2.1. Permasalahan Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang....	51
2.2.2. Telaah Renstra, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ) dan Renstra Provinsi Jawa Tengah. 55	
2.2.3. Isu Strategis.....	67
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	70
3.1. Tujuan Renstra BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 70	
3.2. Sasaran Renstra BPBD Kabupaten Rembang tahun 2025-2029 71	
3.3. Strategi Perangkat Daerah .....	75
3.4. Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Rembang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.	75
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	79
4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	79
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	130
BAB V PENUTUP .....	133
5.1. Kaidah Pelaksanaan.....	133
5.2. Pengendalian dan Evaluasi.....	135
5.3. Pedoman Transisi.....	135

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	14
Tabel 2. 2	Data Pegawai BPBD Kabupaten Rembang Berdasarkan Golongan Tahun 2025.....	15
Tabel 2. 3	Data Pegawai BPBD Kabupaten Rembang Berdasarkan Jabatan Tahun 2025.....	16
Tabel 2. 4	Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Rembang Berdasarkan Kondisi .....	18
Tabel 2. 5	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sampai dengan 2024.....	23
Tabel 2. 6	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024.....	26
Tabel 2. 7	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024.....	37
Tabel 2.8	Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024.....	28
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	53
Tabel 2.10	Arah Kebijakan dan Strategi Renstra BNPB Tahun 2025-2029.....	56
Tabel 2.11	Keterkaitan Kebijakan Nasional dan Arah Kebijakan BNPB Tahun 2025-2029 .....	59
Tabel 2.12	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Provinsi Jawa Tengah.....	64
Tabel 2.13	Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	69
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 .....	72
Tabel 3.2	Penahapan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.....	75
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra BPBD Kabupaten Rembang .....	76
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BPBD Kabupaten Rembang .....	84
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	98
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	128

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Rembang .....	13
---	----

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program perangkat daerah yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang untuk periode 2025-2029 merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana.

Renstra Perangkat Daerah disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan menentukan langkah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih periode 5 (lima) tahun ke depan. Renstra periode 2025-2029 menyajikan agenda utama kegiatan BPBD Kabupaten Rembang dalam mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai selama lima tahun.

Kabupaten Rembang memiliki beberapa jenis bencana yang rawan terjadi, meliputi bencana banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Rembang selama 4 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, dari sebelumnya tinggi menjadi sedang selama 3 tahun berturut-turut. Mengingat secara geografis Kabupaten Rembang berada di daerah yang rawan terjadi bencana, tantangannya indeks risiko bencana tersebut harus bisa ditekan pada level yang rendah. Renstra BPBD 2025-2029 ini disusun untuk menjawab tantangan tersebut, dengan fokus pada peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan pascabencana.

Renstra BPBD Kabupaten Rembang merupakan bentuk komitmen BPBD Kabupaten Rembang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang sekaligus wujud dan peran serta BPBD Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten

Rembang Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Rembang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja.

Renstra BPBD Kabupaten Rembang mengakomodir Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Berbagai peraturan dan perundangan yang ditetapkan, dalam penyelenggaraan bencana di Kabupaten Rembang yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,

- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 );
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44);
  11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
  15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 th. 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050.5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1441);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

- Tahun 2026 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
  29. Peraturan Bupati Rembang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.
  30. Perda Kabupaten Rembang nomor 5 tahun 2022 tentang Pengarustamaan Gender
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 170);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 207);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029;
  34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BPBD Kabupaten Rembang sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Rembang.

Tujuan penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Rembang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Rembang dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Rembang.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Rembang untuk kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Rembang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur BPBD Kabupaten Rembang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Rembang yang merupakan dokumen perencanaan BPBD Kabupaten Rembang tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

##### **Bab I      Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang; dasar hukum penyusunan; maksud dan tujuan; serta sistematika penulisan.

##### **Bab II     Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi dua subbab. Pertama, subbab gambaran pelayanan perangkat daerah. Berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; kinerja pelayanan perangkat daerah; dan kelompok sasaran layanan. Pada subbab ini dapat memuat informasi tambahan sesuai dengan kondisi daerah. Kedua, subbab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah. Berisi tentang permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis perangkat daerah.

##### **Bab III    Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang tujuan, sasaran, strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

##### **Bab IV     Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang uraian program; uraian kegiatan; uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; uraian subkegiatan dalam rangka mendukung

program prioritas pembangunan daerah; target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah; dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui IKK.

## **Bab V Penutup**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Peraturan Bupati Rembang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa BPBD mempunyai tugas:

1. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi serta penanggulangan kebakaran secara adil dan setara;
2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas di atas, Badan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPBD didelegasikan menjadi tiga bidang dan sekretariat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati

Rembang Nomor 77 Tahun 2021 sebagai berikut:

### **1) Kepala Pelaksana**

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi sub urusan penanggulangan bencana dan sub urusan penanggulangan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

### **2) Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan;

- c. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- d. pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan Badan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Adapun fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **4) Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi**

Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik yang terdiri dari kedaruratan serta logistik, dan rehabilitasi rekonstruksi.

Adapun fungsi Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi adalah sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang kedaruratan serta logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang kedaruratan serta logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang kedaruratan serta logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **5) Bidang Pemadam Kebakaran**

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Pemadam Kebakaran yang terdiri dari pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana.

Adapun fungsi Bidang Pemadam Kebakaran adalah:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.

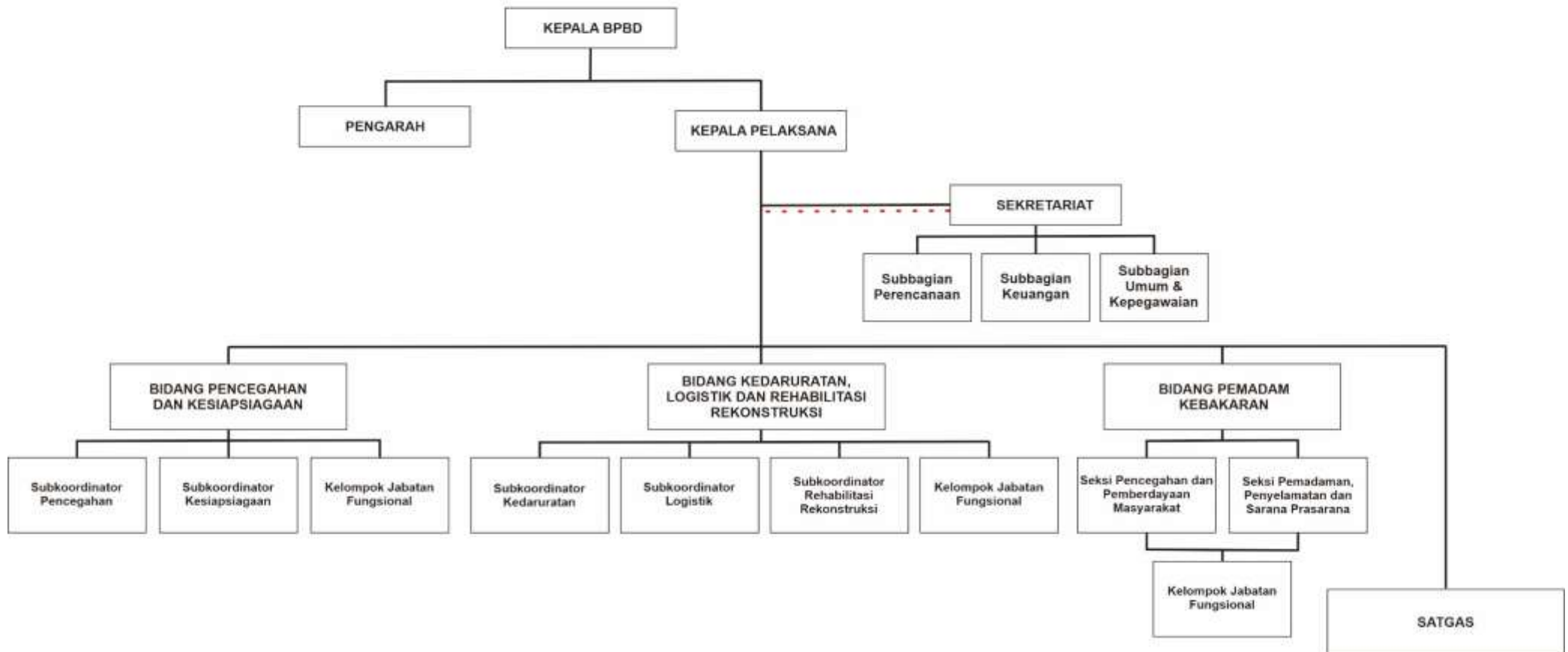
Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Rembang menurut Perbup Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Kepala BPBD;  
Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
2. Unsur Pengarah BPBD;
  - a. Unsur Pengarah dipimpin oleh seorang Ketua Unsur Pengarah yang dijabat oleh Kepala BPBD;
  - b. Jumlah Anggota Unsur Pengarah 9 (sembilan) orang;
  - c. Anggota Unsur Pengarah terdiri atas 5 (lima) orang dari unsur lembaga/perangkat daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana serta 4 (empat) orang dari unsur pakar, profesional dan tokoh masyarakat.
3. Unsur Pelaksana BPBD
  - a. Kepala Pelaksana BPBD;
  - b. Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari:
    - 1) Subbagian Perencanaan
    - 2) Subbagian Keuangan
    - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:
    - 1) Subkoordinator Pencegahan
    - 2) Subkoordinator Kesiapsiagaan
  - d. Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi terdiri dari:
    - 1) Subkoordinator Kedaruratan
    - 2) Subkoordinator Logistik
    - 3) Subkoordinator Rehabilitasi Rekonstruksi
  - e. Bidang Pemadam Kebakaran terdiri dari:
    - 1) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
    - 2) Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana
  - f. Satuan Tugas
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang, terdiri atas

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REMBANG**



**Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Rembang**

*Sumber : Peraturan Bupati Rembang Nomor 77 Tahun 2021*

### 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya BPBD Kabupaten Rembang memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur BPBD Kabupaten Rembang sampai Bulan Mei Tahun 2025 dengan komposisi sebagaimana pada tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Kategori						Jumlah
		PNS		PPPK		Non PNS		
		L	P	L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	20		13	1			34
2	D3	1	2					3
3	S1	8	2					11
4	S2	6	1					7
	<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>55</b>

*Sumber : BPBD Kabupaten Rembang, 2025*

Tingkat pendidikan pegawai yang paling banyak adalah SMA sederajat dengan jumlah 34 orang atau sekitar 61,8% dari total pegawai. Selanjutnya, pegawai dengan pendidikan S1 berjumlah 11 orang atau sekitar 20%, kemudian S2 sebanyak 7 orang atau sekitar 12,7%, dan D3 sebanyak 3 orang atau sekitar 5,5%.

Tingkat pendidikan pegawai yang relatif baik tersebut menjadi modal penting dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kinerja organisasi BPBD Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.

Berdasarkan golongan, secara lengkap komposisi pegawai BPBD Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Tabel 2.2. Berdasarkan golongan, secara lengkap komposisi pegawai BPBD berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Data Pegawai BPBD Kabupaten Rembang Berdasarkan Golongan Tahun 2025**

No	Golongan	L	P	Jumlah	Kelas Jabatan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-	-	-	-	-
2	Golongan II	9	1	10	5,6,7			10
3	Golongan III	23	4	27	8,9,11			27
4	Golongan IV	5	1	6	9,11,12,14			6
	<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>6</b>	<b>43</b>				<b>43</b>

*Sumber : BPBD Kabupaten Rembang, 2025*

jumlah pegawai BPBD Kabupaten Rembang berdasarkan golongan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 43 orang pegawai PNS, yang terdiri dari 37 pegawai laki-laki dan 6 pegawai perempuan.

Dilihat dari komposisi golongan, Golongan III merupakan golongan dengan jumlah pegawai terbanyak yaitu 27 orang, terdiri dari 23 laki-laki dan 4 perempuan. Selanjutnya, Golongan II berjumlah 10 orang yang terdiri dari 9 laki-laki dan 1 perempuan. Sementara itu, Golongan IV berjumlah 6 orang dengan komposisi 5 laki-laki dan 1 perempuan. Pada Golongan I tidak terdapat pegawai.

Berdasarkan kelas jabatan, pegawai pada Golongan II berada pada kelas jabatan 5, 6, dan 7 dengan jumlah 10 orang. Pegawai pada Golongan III berada pada kelas jabatan 8, 9, dan 11 dengan jumlah 27 orang, sedangkan pegawai pada Golongan IV berada pada kelas jabatan 9, 11, 12, dan 14 dengan jumlah 6 orang.

Komposisi pegawai berdasarkan golongan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai BPBD Kabupaten Rembang berada pada Golongan III, yang umumnya merupakan kelompok pegawai

dengan tingkat pengalaman dan tanggung jawab yang cukup besar dalam pelaksanaan tugas organisasi.

**Tabel 2.3 Data Pegawai BPBD Kabupaten Rembang Berdasarkan Jabatan Tahun 2025**

No	Jabatan	Kelas Jabatan	L	P	Jumlah
<b>I</b>	<b>Jabatan Struktural</b>				
1	Kepala Pelaksana	14		1	1
2	Sekretaris	12	1		1
3	Kepala Bidang	11		3	3
4	Kasub Bag	9		3	3
<b>II</b>	<b>JFT</b>				
1	Analisis Kebencanaan		1		1
2	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda		1		1
3	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama		1		1
4	Pemadam Kebakaran Mahir		3		3
5	Pemadam Kebakaran Trampil		4		4
6	Pemadam Kebakaran Pemula		14		14
<b>III</b>	<b>JFU</b>				
1	Analisis Bencana		1		1
2	Analisis Dampak Sosial		1		1
3	Analisis Kelembagaan		1		1
4	Pengelola Logistik		1		1
5	Penyuluh Bencana		1		1
6	Penata Keuangan		1		1
7	Pranata Komputer			1	1
8	Pengelola Keuangan		2		2
9	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik			1	1
10	Teknisi Pemeliharaan sarana dan prasarana		3		3
11	Pengadministrasi Umum		3		3
12	Pranata Pemadam		4		4

	Kebakaran				
13	Pengadministrasi Pengaduan Publik		2		2
14	Pengemudi Pemadam Keakaran		2		2
	<b>Total</b>				<b>55</b>

*Sumber : BPBD Kabupaten Rembang, 2025*

Komposisi pegawai BPBD Kabupaten Rembang tahun 2025 berdasarkan jabatan terdiri atas jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu (JFT), dan jabatan fungsional umum (JFU). Pada jabatan struktural, terdapat beberapa posisi yaitu Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian yang masing-masing menempati kelas jabatan yang berbeda sesuai dengan tingkat tanggung jawab dalam organisasi.

Pada jabatan fungsional tertentu (JFT), pegawai BPBD Kabupaten Rembang terdiri dari beberapa jenis jabatan antara lain Analis Kebencanaan, Penata Penanggulangan Bencana, serta Pemadam Kebakaran dengan jenjang jabatan yang berbeda-beda. Jabatan fungsional ini memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas teknis penanggulangan bencana. Sementara itu, pada jabatan fungsional umum (JFU) terdapat berbagai jenis jabatan yang mendukung kegiatan administrasi dan operasional organisasi, seperti analis, pengelola, penyuluh, pranata komputer, serta teknisi. Keberadaan jabatan fungsional umum ini berperan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi secara administratif maupun teknis.

Secara keseluruhan, komposisi jabatan tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia di BPBD Kabupaten Rembang telah tersusun sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.

Disamping diperlukan sumber daya manusia yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kebencanaan juga sangat diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sarana dan Prasarana ini digunakan dalam kondisi tertentu, yang dapat dimobilisasikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam berbagai skala baik lokal, regional maupun nasional. Dengan demikian BPBD Kabupaten Rembang

menggunakan sarana dan prasarana ini secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan daerah dalam menangani bencana.

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Selain itu juga diperlukan sarana dan prasarana kebencanaan yang mendukung proses evakuasi dan tanggap darurat saat di lapangan. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Rembang Berdasarkan Kondisi**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Rusak		
				Ringan	Sedang	
	<b>Gedung dan Bangunan</b>					
1	Gedung kantor	Unit	1			1
2	Gedung garasi/ pool permanen		3			3
3	Gudang		2			2
4	Posko Damkar Rembang	Unit	2			2
	<b>Peralatan dan Mesin</b>					
1	Genset	Unit	1			1
2	Pompa air	Unit	2			2
3	Mesin Tempel	Unit			1	1
4	Kapal alumunium	Unit	2			2
5	Bor		1			1
6	Kompresor		1			1
7	Gerinda		1			1
8	Gergaji mesin		9		1	10
10	Las		1			1
11	Pitot		1			1
12	Tanggem		1			1
13	Gps (garmin Oregon)	Unit		1		1
14	Sprayer				31	31

	<b>Alat Kantor Dan Rumah Tangga</b>						
1	Kalkulator	Unit			1		1
2	Lemari Besi	Unit	10				10
3	Lemari kayu	Unit	3				3
4	Rak besi	Unit	5				5
5	Rak Kayu	Unit	14				14
6	Feeling Kabinet Besi	Unit	2				2
7	Lemari Kaca	Unit	3				3
8	cctv	Unit	1				1
9	Papan Nama	Unit	1				1
10	Papan pengumuman	Unit				1	1
11	Vilbed	Unit				18	18
12	Lampu HLD	Unit	2				
13	Genset	Unit					
14	Watertretmea n	Unit		1			1
15	Pompa Air	Unit	2				2
16	HT	Unit	20		30		50
17	Radio	Unit	4				4
18	Perahu karet	Unit	1				1
19	Mesin Perahu karet	Unit		1			1
20	Peralatan Clambling	Unit	1				1
21	Perahu evakuasi	Unit	2				2
22	Mesin pompa karhutla	Unit				2	2
23	Tandu Basket	Unit	1				1
24	Senter Tactical	Unit	2				2
25	Meja rapat	Unit	12				12
26	Meja Podium	Unit	1				1
27	Meja Resepsionis	Unit	1				1
28	Meja Panjang	Unit	1				1
29	Kursi putar	Unit	14		20		34
30	Meja ½ biro	Unit	27				27
31	Kursi Rapat	Unit			6		6
32	Kursi lipat	Unit				125	125
33	Meja komputer	Unit	1		4		5
34	Sketsel	Unit	2				2
35	Lemari pakaian	Unit	2				2

36	Vacum debu	Unit	1				1
37	Potong rumput	Unit	1				1
38	Lemari es	Unit	1				1
39	A.C Split	Unit	10		9		19
40	Kipas angin	Unit	2			2	4
41	Kompor gas	Unit	2		2		4
42	Rice Cooker	Unit	1	1			2
43	Tabung Gas	Unit	3				3
44	Televisi	Unit	5			2	7
45	Sound system	Unit	2		1		3
46	wirreles	Unit	1				1
47	Megaphone	Unit	3				3
48	Camera video	Unit	1				1
49	Tiang bendera	Unit	1				1
50	Tangga Alumunium	Unit			1	1	2
51	Dispenser	Unit				1	1
52	Handycam	Unit	1			1	2
53	Wc portable	Unit	2				2
54	Alat pemadam portable	Unit	1				1
55	Selang pemadam	Unit	6				6
56	Pipa pemancar	Unit	3				3
57	Helm pemadam	Unit	5				5
58	Meja kerja pejabat	Unit	14				14
59	Kursi kerja pejabat	Unit	13		2		15
60	Meje pegawai non structural	Unit	5				5
61	Meja tamu	Unit	7				7
62	Meja operator	Unit	1		1		2
63	Lemari buku	Unit	10				10
64	Buffet kayu	Unit	5				5
65	Antenna besar	Unit	1				1
66	Antenna uhf portable	Unit				13	13
67	Antenna penerima vhf	Unit	5		10		15
68	Thermometer	Unit	6				6
	<b>Komputer</b>	Unit					
1	P.C Unit	Unit	6			4	10
2	Laptop	Unit	20		10	5	35
3	Note book	Unit	1				1
4	Tablet	Unit	1				1

5	Printer	Unit	24		7	8	39
6	Scaner	Unit	2				2
7	HP		3				3
8	Server	Unit	1				1
	<b>Alat keselamatan</b>						
1	Tenda	Unit	16				16
2	Alat Selam	Unit	3				3
	<b>Rambu-Rambu</b>						
1	Rambu-Rambu Peringatan	Buah	78				78
	<b>Alat Angkutan</b>						
1	Station Wagon	Unit	4				4
2	Truck Attacment	Unit	1				1
3	Pic up	Unit	3				3
4	Sepeda motor	Unit	33				33
5	Mobil Damkar	Unit	5				5
6	Mobil Tangki	Unit	2				2
7	Perahu Evakuasi	Unit	5				5
	<b>Alat laborat</b>	<b>Unit</b>	<b>6</b>				<b>6</b>

*Sumber : BPBD Kabupaten Rembang, 2025*

Sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan kebencanaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas mapun peralatan penunjang pekerjaan dan peralatan kebencanaan dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai. Permasalahan pada aset, sarana dan prasarana di BPBD Kabupaten Rembang berkaitan dengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah personil. Selain itu, ruang rapat yang ada juga sudah tidak memadai dan ditambah lahan parkir yang terbatas. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang peralatan kebencanaan BPBD Kabupaten Rembang.

### **2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja digunakan untuk

melihat keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja.

Pencapaian kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sampai dengan 2024**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Persentase Capaian Renstra PD			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1				2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar														
1	05			Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat														
1	05	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Persentase Capaian Renstra PD			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1				2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Kabupaten/Kota														
					IKM	Angka	NA	76	77	78	81,78	80,72	78,75	93,16	NA	106,21	102,27	119,44
					SAKIP	Angka	NA	71	73	75	72,72	77,30	69,65	70,40	NA	108,87	95,411	93,87
1	05	03		Program Penanggulangan Bencana														
					Persentase penanganan kejadian bencana	%	NA	100	100	100	100	100	100	100	NA	100	100	100,00
					Persentase Desa Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	%	NA	16,39	32,79	49,18	NA	11,48	22,95	24,59	NA	70,04	69,99	50,00
1	05	04		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Persentase Capaian Renstra PD			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Non Kebakaran														
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana damkar	%	NA	30	35	40	NA	28	36	36	NA	93,33	101,00	90,00
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kab. Rembang	%	NA	30	35	40	NA	100	100	100	NA	333,33	285,71	250,00

Sumber : BPBD Kabupaten Rembang 2025

**Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024**

No	Indikator Tujuan PD / Indikator Sasaran PD / Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target Renstra PD					Realisasi Tahun					Pertumbuhan Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Renstra Tahun 2016-2021</b>																	
1	Indikator Tujuan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	Indikator Sasaran	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	Indikator Kinerja Kunci	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Renstra Tahun 2021-2026</b>																	
1	Indikator Tujuan: Indeks Ketahanan Daerah	Angka	NA	NA	0,57	0,59	0,61	NA	0,55	0,56	0,63	0,65	NA	NA	101,8	93,7	106,6
2	Indikator Sasaran: Presentase penanganan bencana daerah	%	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100
3	Indikator Sasaran: Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	NA	NA	30	35	40	NA	100	100	100	100	NA	NA	28	36	36

Sumber : BPBD Kabupaten Rembang 2025

**Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024**

NO	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi renstra PD				Rasio Capaian Renstra PD			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	%	15	30	35	40	100	100	100	100	666,7	333,3	285,7	250

Sumber : BPBD Kabupaten Rembang 2025

**Tabel 2.8 Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024**

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Proram	Satuan	Pagu Anggaran (Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				4.405.012.000	6.295.324.500	9.640.085.502	6.645.535.000		4.272.769.669	5.764.514.309	9.069.946.556	6.462.743.432		96,99	91,57	94,09	97,25
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.405.012.000	6.295.324.500	9.640.085.502	6.645.535.000		4.272.769.669	5.764.514.309	9.069.946.556	6.462.743.432		96,99	91,57	94,09	97,25
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Kejadian Bencana	%		670.518.100	1.834.680.000	5.667.585.502	565.000.000		621.729.000	1.471.574.589	5.324.434.566	544.023.925		92,72	80,21	93,95	96,29
	Persentase Desa Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	%															
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	%		73.500.000	600.000.000	170.000.000	196.150.000		72.488.000	384.466.000	90.791.500	194.263.000		98,62	64,08	53,41	99,04
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi,	Laporan		73.500.000	400.000.000	170.000.000			72.488.000	384.466.000	90.791.500			98,62	96,12	53,41	

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Proram	Satuan	Pagu Anggaran (Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun																
Penyusunan kajian risiko bencana kabupaten/kota					200.00 0.000		196.150. 000			0		194.263. 000			0	99,04	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%		320.00 0.000	301.36 0.000	550.00 0.000	245.000. 000		281.131. 000	257.082. 249	511.306. 500	230.092. 400		87,85	85,31	92,96	93,92

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Proram	Satuan	Pagu Anggaran (Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Dokumen															
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Dokumen			136.21 0.000		70.000.0 00			115.878. 000		67.061.5 00		85,07		95,80	
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman)	laporan															

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Proram	Satuan	Pagu Anggaran (Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kabupaten/Kota																
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Laporan				350.000.000	75.000.000				350.000.000	72.211.000				100	96,28
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang	orang				200.000.000	100.000.000				165.515.000	90.819.900				82,76	90,82

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Proram	Satuan	Pagu Anggaran (Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana																
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun																
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun																
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan			195.000.000					194.080.000					99,53			

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Proram	Satuan	Pagu Anggaran (Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Bencana Kabupaten/Kota	Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya																
Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota				125.000.000	85.000.000				87.051.000	84.822.000				69,64	99,79		
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun																
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan				80.150.000					56.382.249					70,35		

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Proram	Satuan	Pagu Anggaran (Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	pencegahan dan mitigasi bencana																
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%		212.018.100	191.880.000	152.100.000	70.000.000		203.300.000	153.396.000	128.285.000	68.280.100		95,89	79,94	84,34	97,54
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan															
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Laporan		127.968.100	116.880.000	20.650.000			125.600.000	114.166.500	20.650.000			98,15	97,68	100	
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per	Laporan															

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Proram	Satuan	Pagu Anggaran (Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			84.050.000	75.000.000	131.450.000	70.000.000		77.700.000	39.229.500	107.635.000	68.280.100		92,44	52,31	81,88	97,54
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota																
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			65.000.000	741.440.000	37.081.000	53.850.000		64.810.000	676.630.340	35.915.990	51.388.425		99,71	91,26	96,86	95,43
Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)					37.081.000					35.915.990					96,86	

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Proram	Satuan	Pagu Anggaran (Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penguatan Kelembagaan Bencana Kab/kota				65.000.000	719.200.000				64.810.000	676.630.340				99,71	94,08		
Kerjasama antar lembaga dan kemitraan daalam pb					22.240.000					0					0		
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun						53.850.000					51.388.425					95,43
PROGRAM PENCEGAHAN , PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Damkar				462.336.500	2.993.140.000	450.000.000			453.299.282	2.979.213.000	428.896.014			98,05	99,53	95,31
	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di																

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Proram	Satuan	Pagu Anggaran (Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kab. Rembang																
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				462.336.500	2.713.498.000	400.000.000			453.299.282	2.665.744.000	382.847.014			98,05	98,24	95,71
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				273.542.895	224.545.000	246.412.000			267.475.182	224.545.000	236.337.500			97,78	100	95,91
Standarisasi sarpras pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri					174.271.050					171.473.100					98,39		
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket						10.098.000					5.024.800					49,76

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Proram	Satuan	Pagu Anggaran (Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran																
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran					71.698.000					46.344.000					64,64	
Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)																
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar					2.417.255.000	143.490.000				2.394.855.000	141.484.714				99,07	98,60

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Proram	Satuan	Pagu Anggaran (Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Teknis Terkait																
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran																
Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga																
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Proteksi lokasi sasaran yang dilakukan inspeksi				8.500.000					8.500.000					100		
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan																

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Proram	Satuan	Pagu Anggaran (Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																
Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang Diinvestigasi																
Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian																
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase anggota masyarakat yang terlatih					339.821.000	50.000.000				313.469.000	46.049.000				92,25	92,09
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya					323.600.000	50.000.000				299.299.000	46.049.000				92,49	92,09

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Proram	Satuan	Pagu Anggaran (Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				6.022.555	16.221.000				5.851.000	14.170.000				97,15	87,36	
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penanganan Kejadian Kondisi Membahayakan Manusia oleh Pemadam Kebakaran																
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal																

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Proram	Satuan	Pagu Anggaran (Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	angka		946.813.900	3.998.308.000	5.677.585.502	5.883.786.955		893.336.982	3.839.640.438	5.324.434.566	5.489.823.493		94,35	96,03	93,78	93,30
	Nilai IKM	%	-														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	%		40.973.900	93.172.800	200.425.000			33.440.000	85.085.200	167.183.300		81,61	91,32	83,41		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.774.900	15.000.000	425.000			10.148.200	14.166.200	425.000		73,67	94,44	100		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-																

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Proram	Satuan	Pagu Anggaran (Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	SKPD																
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			7.879.000	14.000.000				6.413.800	8.633.500				81,40	61,67		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD																
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi																

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Proram	Satuan	Pagu Anggaran (Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.320.000	64.172.800	200.000.000			16.878.000	62.285.500	166.758.300			87,36	97,06	83,38	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% dokumen manajemen kepegawaian yang di kelola dengan baik	%															
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen															

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Proram	Satuan	Pagu Anggaran (Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	%		5.140.000	2.816.938.000	4.102.305.602	4.898.931.455		5.044.000	2.687.841.934	3.835.273.818	4.532.088.965		98,13	95,42	93,49	92,51
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		4.782.000	7.500.000				4.718.000	6.198.000				98,66	82,64		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		358.000	160.580.000	56.172.000	80.280.000		326.000	160.565.000	56.172.000	80.280.000		91,06	99,99	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan			2.648.858.000	4.046.133.602	4.818.651.455			2.521.078.934	3.779.101.818	4.451.808.965			95,18	93,40	92,39
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkatoran	%		162.177.000	249.507.200	144.729.900			147.859.550	246.266.250	143.107.600			91,17	98,70	98,88	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen															
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		51.150.000	18.619.000	15.512.500				32.995.000	18.601.000	14.304.500			64,51	99,90	92,21

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Proram	Satuan	Pagu Anggaran (Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket			33.000.000		14.385.000			22.995.000		14.339.500			69,68		99,68
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			26.250.000	10.118.000	12.888.000			11.005.350	10.102.000	12.630.000			41,93	99,84	97,99
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5.000.000	4.948.300	2.807.000	5.000.000		3.154.000	4.948.300	2.456.500	3.691.800		63,08	100	87,51	73,84
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			249.507.200					50.313.000					20,16		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			5.000.000	10.694.500	18.000.000			4.182.500	9.969.500	16.508.000			83,65	93,22	91,71
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen															
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			11.107.200	88.575.900	65.583.000			9.827.100	88.074.600	65.451.822			88,48	99,43	99,79
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen pengelolaan BMD yang terpelihara dengan baik	%			132.330.000	450.927.500	117.596.000			128.755.791	435.611.200	114.028.400			97,29	96,60	96,97

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Proram	Satuan	Pagu Anggaran (Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					20.070.000					19.687.500					98,09
Pemeliharaan Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya						12.925.000	16.188.000				11.930.000	16.025.900				92,30	98,99
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	laporan			87.330.000	128.574.000	81.338.000			84.002.191	114.252.700	78.315.000			96,19	88,86	96,28
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Ka dan Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhabilitasi				45.000.000	309.428.500				44.753.600	309.428.500				99,45	100	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana pengadaan BMD	%															
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit															

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Proram	Satuan	Pagu Anggaran (Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya gedung kantor atau bangunan lainya yang disediakan	unit															
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit															
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan layanan admniastrasi	%			706.36 0.000	779.19 8.000				691.691. 263	743.258. 648				97,92	95,39	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			88.050. 000	118.70 0.000	108.600. 000			79.433.2 63	106.316. 098	102.904. 756			90,21	89,57	94,76
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					6.267.0 00	104.600. 000				5.267.00 0	101.376. 800				84,04	96,92
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			616.31 0.000	652.67 0.000	522.291. 000			610.268. 000	630.292. 550	512.118. 950			99,02	96,57	98,05
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			2.000.0 00	1.561.0 00	400.000			1.990.00 0	1.383.00 0	380.000			99,5	88,59	95
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase perencanaan dan penggaran OPD berkualitas baik	%															

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Proram	Satuan	Pagu Anggaran (Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja dengan kualitas baik	%															
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan															
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen															
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen															
JUMLAH																	

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang merupakan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang mencakup perlindungan masyarakat (warga negara) terhadap bencana, mulai dari tahap prabencana, masa tanggap darurat, sampai pada tahap pascabencana.

Adapun kelompok sasaran layanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang adalah masyarakat (warga negara) yang berada di wilayah Kabupaten Rembang serta seluruh *stakeholder* terkait dengan penanganan kebencanaan. Berpijak pada kondisi diatas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang dituntut untuk mampu merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan publik akan layanan bidang kebencanaan secara maksimal dan komprehensif, serta secara aktif melakukan kemitraan strategis dengan pihak-pihak terkait semisal BASARNAS, BKSDA, Perguruan Tinggi, serta Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang kemanusiaan dan kebencanaan.

Selain masyarakat secara umum dan para pemangku kepentingan, kelompok sasaran layanan BPBD juga mencakup kelompok rentan berbasis gender yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dalam situasi bencana, seperti perempuan, anak, lanjut usia, ibu hamil dan menyusui, serta penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Rembang. Dalam praktiknya, perempuan kerap menghadapi tantangan spesifik, antara lain keterbatasan akses terhadap informasi kebencanaan, kebutuhan layanan kesehatan reproduksi saat masa tanggap darurat, serta potensi risiko kekerasan berbasis gender di lokasi pengungsian. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Rembang perlu memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan kebencanaan dilakukan secara responsif gender, termasuk melalui penyediaan data terpilah, fasilitas pengungsian yang ramah perempuan dan anak, serta pelibatan aktif perempuan dalam kegiatan mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

#### **2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan**

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi lintas sektor, terutama antara BPBD dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Dalam upaya penanggulangan bencana, kolaborasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan layanan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membutuhkan dukungan dari

berbagai instansi pemerintah untuk memastikan setiap tahapan penanganan bencana, mulai dari prabencana hingga pascabencana, berjalan secara efektif.

**Sekretariat Daerah** berperan sebagai koordinator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penanggulangan bencana. **BAPPEDA** bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk integrasi program penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). **BPPKAD** mengelola aspek keuangan daerah, termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana. **DPUTARU** dan **Dinas PERKIM** berperan dalam pemulihan infrastruktur dan perumahan pascabencana. **Dinas Kesehatan** menyediakan layanan medis dan kesehatan lingkungan, sementara **DINSOSPPKB** menangani aspek sosial, termasuk bantuan kepada korban bencana. **DLH** bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup, termasuk penanganan limbah pascabencana. **SATPOL PP** membantu dalam penegakan peraturan daerah dan pengamanan lokasi bencana. **DINKOMINFO** memastikan komunikasi dan informasi publik berjalan lancar selama penanganan bencana. **RSUD** menyediakan layanan kesehatan rujukan bagi korban bencana. **PDAM** dan **PLN** memastikan ketersediaan air bersih dan listrik selama dan setelah bencana.

**TNI/POLRI** berperan dalam evakuasi, pengamanan, dan bantuan logistik. Seluruh **kantor kecamatan, kelurahan, dan desa** menjadi garda terdepan dalam respons cepat di tingkat lokal. Kemitraan ini diperkuat dengan koordinasi bersama lembaga/instansi lain yang relevan di wilayah Kabupaten Rembang.

Dengan adanya sinergi lintas sektor ini, upaya penanggulangan bencana dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Kemitraan antar instansi pemerintah tidak hanya memperkuat kapasitas BPBD, tetapi juga mempercepat pemulihan dan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Permasalahan Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang**

Salah satu amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bencana merupakan salah satu indikator dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara umum Indonesia berada di kawasan rawan bencana dalam garis cincin api (*ring of fire*) dan berada di daerah patahan yang rawan terjadi gempa bumi. Begitu pula di Kabupaten Rembang yang teridentifikasi adanya Patahan Lasem sehingga rawan terjadi gempa bumi. Selain itu

Kabupaten Rembang memiliki beberapa jenis bencana yang rawan terjadi, meliputi bencana banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi.

Kawasan Rawan Bencana Banjir berlokasi di Kabupaten Rembang tersebar di seluruh kecamatan yang terjadi secara periodik ketika musim penghujan. Lokasi daerah rawan longsor di Kabupaten Rembang tersebar di bagian selatan dan timur wilayah Kabupaten Rembang.

Abrasi menjadi permasalahan utama di kawasan pesisir Rembang di bagian timur meliputi Kecamatan Sluke, Kragan dan Sarang, yang mempunyai resiko abrasi dalam kategori sangat tinggi. Selain di wilayah pesisir timur, abrasi pantai juga terjadi di wilayah barat yaitu Kecamatan Kaliori, terutama di Desa Matalan, Wates dan Paloh. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Belum optimalnya penyampaian informasi bencana kepada masyarakat di kawasan rawan bencana
2. Belum optimalnya edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk penyimpan logistik dan peralatan bencana;
3. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
4. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Rembang;
5. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang;
6. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Rembang;
7. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang;
8. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran;
9. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam cara penanganan kebakaran yang benar;
10. Kurang maksimal layanan pemadam kebakaran terhadap jarak lokasi kebakaran dikarenakan belum adanya UPT Pos Damkar dan armada hanya terpusat di Pos Damkar.

**Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1.	Rendahnya kapasitas daerah dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.	Belum tercapainya target pembentukan Destana dan Kencana	Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana (Destana) di seluruh desa rawan bencana dan kecamatan tangguh bencana (Kencana) di Kabupaten Rembang
2.	Terbatasnya kapasitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam memberikan respons cepat dan efektif.	Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM penanggulangan bencana serta penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang
		Belum optimalnya komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kemandirian penanggulangan bencana serta penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Rendahnya kepedulian masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran
		Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana serta	Belum optimalnya penyampaian informasi dan komunikasi bencana kepada masyarakat di kawasan rawan bencana

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		penyelamatan kebakaran dan non kebakaran;	
		Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan atau kajian ilmiah penanggulangan bencana dan penanganan penyelamatan kebakaran.	Belum optimalnya edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana
			Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana
			Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Rembang
			Kurang maksimal layanan pemadam kebakaran terhadap jarak lokasi kebakaran dikarenakan belum adanya UPT Pos Damkar dan armada hanya terpusat di Pos Damkar
			Belum lengkapnya pedoman dan dokumen

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang

*Sumber: BPBD Kabupaten Rembang 2025*

## **2.2.2. Telaah Renstra, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ) dan Renstra Provinsi Jawa Tengah.**

### **2.2.2.1. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ) tahun 2025-2029**

Arah kebijakan nasional yang menjadi acuan dalam penanggulangan bencana di Indonesia adalah RIPB Tahun 2020-2044, RPJP Tahun 2025-2045, dan RPJMN Tahun 2025-2029, arahan-arahan dalam Renas PB Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis BNPB 2025-2029.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan Lembaga pemerintah non Kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sinergitas pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BNPB Tahun 2025-2029 melibatkan seluruh unit kerja BNPB dan juga didukung oleh lembaga lain, baik di tingkat pusat maupun daerah. BNPB berperan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Keterlibatan daerah merupakan faktor kunci untuk memastikan bahwa program dan kegiatan BNPB memiliki dukungan, sinergi, serta keberlanjutan di tingkat nasional dan daerah. BNPB tidak dapat bekerja sendiri; keberhasilan penanggulangan bencana sangat bergantung pada peran pemerintah daerah karena merekalah pihak pertama yang merespons bencana. Peran daerah mencakup integrasi program BNPB ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra BPBD), pelaksanaan kegiatan bersama seperti pelatihan, simulasi, dan penyusunan rencana kontingensi, penguatan kapasitas BPBD melalui dukungan sumber daya manusia,

anggaran, dan peralatan, pertukaran data dan informasi risiko bencana secara berkala, serta koordinasi lintas wilayah untuk penanganan bencana yang melintasi batas administratif. Selain itu, daerah juga berperan dalam membangun jejaring kemitraan lokal guna memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.

Upaya-upaya demi mewujudkan sasaran strategis BNPB diimplementasikan melalui arah kebijakan dan strategi Renstra BNPB Tahun 2025-2029.

**Tabel 2.10 Arah Kebijakan dan Strategi Renstra BNPB Tahun 2025-2029**

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Penguatan integrasi sistem dan strategi penanggulangan bencana yang terpadu, inovatif, dan inklusif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem dan strategi penanggulangan bencana.</li> <li>2. Meningkatkan Integrasi risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan dan sektoral.</li> <li>3. Menyusun Analisis Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana.</li> <li>4. Meningkatkan pemanfaatan hasil kajian akademis/penelitian dan literasi kebencanaan.</li> <li>5. Mengembangkan skema pendanaan inovatif dalam penanggulangan bencana.</li> <li>6. Penguatan data informasi terkini dan terpilah, serta kerja sama dengan media untuk perluasan informasi kebencanaan.</li> </ol>
2.	Peningkatan upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini terhadap bencana secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem peringatan dini multi ancaman terpadu dan inklusif.</li> <li>2. Meningkatkan kolaborasi dalam membangun ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat.</li> <li>3. Mitigasi bencana berdasarkan karakteristik ancaman kebencanaan per wilayah Pulau.</li> <li>4. Menyusun Rencana Aksi Mitigasi Bencana.</li> </ol>

3.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana.</li> <li>2. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana.</li> <li>3. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan dalam penanganan darurat bencana.</li> <li>4. Memperkuat kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.</li> </ol>
4.	Peningkatan kualitas rehabilitasi & rekonstruksi pasca bencana yang lebih efektif, aman, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis tata ruang dan pengurangan risiko bencana.</li> <li>2. Meningkatkan keterlibatan dan sinergi multipihak untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada seluruh aspek secara efektif.</li> </ol>
5.	Peningkatan kapasitas resiliensi berkelanjutan logistik dan pemenuhan peralatan untuk mendukung penanggulangan bencana berbasis kewilayahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kapasitas Logistik dan Peralatan dalam Penanggulangan Bencana.</li> <li>2. Meningkatkan Kemitraan dan Jejaring Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.</li> <li>3. Pengembangan Inovasi dan teknologi Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.</li> <li>4. Membangun Pusat Dukungan Logistik dan Peralatan melalui konektivitas antar pulau.</li> </ol>
6.	Perwujudan tata kelola penyelenggaraan manajemen kebencanaan yang profesional, akuntabel, dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem regulasi yang handal dan terpadu dalam mendukung kinerja sistem penanggulangan bencana.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dan pemenuhan NSPK penanggulangan bencana.</li> <li>3. Meningkatkan ketersediaan SDM yang memiliki keahlian dan profesional di</li> </ol>

	transparan	<p>Bidang Kebencanaan, termasuk sertifikasi kompetensi.</p> <p>4. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan, pemantauan, dan evaluasi penanggulangan bencana.</p> <p>5. Meningkatkan advokasi resiliensi berkelanjutan di tingkat nasional dan global.</p>
--	------------	---

Sumber: Renstra BNPB 2025-2029

Arah kebijakan BNPB Tahun 2025-2029 juga harus selaras dengan seluruh arahan kebijakan nasional untuk mendukung sistem dan tata kelola penanggulangan bencana nasional, meliputi Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044, Rencana Nasional (Renas) Penanggulangan Bencana 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional.

**Tabel 2.11 Keterkaitan Kebijakan Nasional dan Arah Kebijakan BNPB Tahun 2025-2029**

Kebijakan RIPB Tahun 2020-2044	Arah Kebijakan PB RPJP Tahun 2025-2045	Highlight Intervensi PB RPJMN Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renas PB Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Rencana Strategis BNPB Tahun 2025 - 2029
1	2	4	5	5
Penguatan Peraturan Perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	Identifikasi karakter dan potensi kebencanaan di seluruh wilayah pulau untuk penyusunan profil risiko dan program mitigasi	Penataan ruang dan penurunan tingkat kerentanan bencana	Penguatan Kerangka Regulasi untuk Mewujudkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Efisien & Efektif	Penguatan integrasi sistem dan strategi penanggulangan bencana yang terpadu, inovatif, dan inklusif
Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.	Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun rencana tata ruang wilayah di setiap tingkatan			
Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.	Pembangunan Grey infrastructure (seawall, breakwater, spillway) dan nature based solution (Pembangunan green belt) untuk wilayah pesisir rentan Tsunami dan kenaikan muka air laut.	Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana	Penguatan Investasi Pengelolaan Risiko Bencana	Peningkatan upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini terhadap bencana secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan

Kebijakan RIPB Tahun 2020-2044	Arah Kebijakan PB RPJP Tahun 2025-2045	Highlight Intervensi PB RPJMN Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renas PB Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Rencana Strategis BNPB Tahun 2025 - 2029
1	2	4	5	5
	<p>Pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga dan komunitas.</p> <p>Pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.</p> <p>Pembangunan sistem peringatan dini multi ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi.</p>	<p>Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi dan peringatan dini terpadu</p>	<p>Peningkatan Ketangguhan Masyarakat dan Lembaga Usaha dalam Menghadapi Bencana</p> <p>Peningkatan Kapasitas &amp; Kapabilitas dalam Kesiapsiagaan dan Penanganan Kedaruratan</p>	
<p>Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.</p>	<p>Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi (penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, dan tanggap darurat bencana)</p> <p>Pengembangan pusat logistik</p>	<p>Penguatan tata kelola penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana</p>	<p>Peningkatan Kapasitas &amp; Kapabilitas dalam Kesiapsiagaan dan Penanganan Kedaruratan</p>	<p>Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal</p> <p>Peningkatan kapasitas</p>

Kebijakan RIPB Tahun 2020-2044	Arah Kebijakan PB RPJP Tahun 2025-2045	Highlight Intervensi PB RPJMN Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renas PB Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Rencana Strategis BNPB Tahun 2025 - 2029
1	2	4	5	5
	<p>dan jaringan kebencanaan melalui konektivitas antar pulau termasuk dampak bencana dan perubahan iklim dalam Pembangunan infrastruktur melalui pelibatan kolaboratif cluster logistic PB dan kemitraan sektor public dan swasta (public private partnerships)</p>			<p>resiliensi berkelanjutan logistik dan pemenuhan peralatan untuk mendukung penanggulangan bencana berbasis kewilayahan</p>
<p>Percepatan pemulihan pasca bencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.</p>	<p>Pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.</p>		<p>Peningkatan Kualitas Rehabilitasi &amp; Rekonstruksi Pascabencana</p>	<p>Peningkatan kualitas rehabilitasi &amp; rekonstruksi pasca bencana yang lebih efektif, aman, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak</p>
<p>Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel</p>	<p>Pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di level Pendidikan dasar dan menengah.</p>		<p>Penguatan Kelembagaan, Pendanaan, dan Peningkatan Kolaborasi Multipihak dalam Penanggulangan Bencana</p>	<p>Perwujudan tata kelola penyelenggaraan manajemen kebencanaan yang profesional, akuntabel, dan transparan</p>

Kebijakan RIPB Tahun 2020-2044	Arah Kebijakan PB RPJP Tahun 2025-2045	Highlight Intervensi PB RPJMN Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renas PB Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Rencana Strategis BNPB Tahun 2025 - 2029
1	2	4	5	5
	Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana.			

Sumber: Renstra BNPB 2025-2029

#### 2.2.2.2. Telaah Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2025-2029 merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, Renstra ini disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengharuskan setiap daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Provinsi Jawa Tengah memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan letusan gunung berapi. Kondisi geografis dan demografis yang kompleks menuntut adanya perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi dalam penanggulangan bencana. Renstra BPBD 2025-2029 ini disusun untuk menjawab tantangan tersebut, dengan fokus pada peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan pascabencana.

Berdasarkan permasalahan belum optimalnya pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah, maka tujuan yang dirumuskan adalah **menurunkan risiko bencana** dengan indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) yang di harapkan setiap tahunnya dapat turun sebesar 4% dari nilai baseline tahun 2024 yaitu 99,61. Dengan penjabaran melalui sasaran meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Sasaran meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di jabarkan dengan program penanggulangan bencana dan kegiatan pelayanan informasi rawan bencana provinsi, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana, dengan sasaran strategis dan indikatornya sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana

2. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota dalam penanganan bencana
3. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota dalam pemulihan pasca bencana
4. Meningkatnya kapasitas dalam pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

Tujuan ini merupakan pernyataan aktif dan positif yang mencerminkan arah preferensi BPBD dalam lima tahun ke depan untuk mewujudkan daerah yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana.

**Tabel 2.12 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Provinsi Jawa Tengah**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	BASELINE TAHUN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Menurunkan Risiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	Angka	0	99,61	96,18	94,75	93,33	91,9	90,48	89,05	89,05
2		Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,8	0,81	0,81

#### 2.2.2.3. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2029.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah “Mewujudkan Rembang Sejahtera”. Dari rumusan visi tersebut, menunjukkan bahwa tujuan utama pembangunan yang ingin dicapai dari tahun 2025 sampai tahun 2029 adalah menjadikan Kabupaten Rembang menjadi wilayah yang sejahtera. Sejahtera pada visi tersebut bermakna terwujudnya masyarakat Kabupaten Rembang yang terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya (pangan, perumahan layak, pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak dan perlindungan sosial), dan merasakan keamanan, ketenteraman dan kebahagiaan lahir dan batin. Kesejahteraan ditandai dengan tingkat pendidikan yang tinggi, derajat kesehatan yang tinggi, tingkat produktivitas yang tinggi dan tingkat pendapatan yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Di samping itu juga memiliki daya saing, modern, inovatif, mandiri dan tangguh dalam lingkungan hidup yang lestari. Makna sejahtera pada visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat

Sejahtera dalam pengertian terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat merujuk pada kondisi di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan akan sandang, pangan dan perumahan layak. Masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli pakaian, barang kebutuhan pokok dan rumah yang layak huni.

## 2. Terpenuhinya Kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan

Selain kebutuhan dasar, masyarakat yang sejahtera ditandai dengan tingkat kemudahan masyarakat untuk memperoleh pendidikan sampai pada pendidikan tinggi. Masyarakat yang sejahtera juga ditandai dengan tingkat atau derajat kesehatan yang tinggi, karena kualitas pelayanan kesehatan yang baik.

## 3. Tingginya Tingkat Pendapatan dan Produktivitas Masyarakat

Masyarakat yang sejahtera juga ditandai dengan tingginya pendapatan masyarakat dan tingginya produktivitas masyarakat. Kondisi ini tercipta karena kondisi perekonomian daerah yang semakin baik, lapangan kerja terbuka luas dan kompetensi yang tinggi serta didukung dengan daerah yang kondusif bagi masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi.

## 4. Terpenuhinya Keamanan, Ketenteraman dan Kebahagiaan Lahir dan Batin

Terwujudnya masyarakat yang sejahtera juga ditandai dengan rasa aman, tenteram dan bahagia lahir serta batin. Timbulnya rasa aman, tenteram dan bahagia lahir serta batin dari masyarakat karena, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, serta fasilitas umum lainnya yang mendukung kehidupan masyarakat secara nyaman dan produktif. Selain itu, pembangunan harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan agar kesejahteraan yang dicapai dapat bertahan dalam jangka panjang. Ini mencakup pengelolaan sumber daya alam yang bijak, pengurangan risiko bencana, serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim guna menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rembang 2025-2029 dirumuskan dalam 5 butir, merupakan gambaran aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai visi

Mewujudkan Rembang Sejahtera, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas dan Berkelanjutan
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Program Prioritas merupakan program strategis yang dirancang dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang. Program ini ditetapkan melalui proses perencanaan yang sistematis dan berbasis pada pendekatan cascading kinerja, yakni penurunan target dari tingkat tujuan dan sasaran daerah ke dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat diukur dan dievaluasi. Dengan pendekatan ini, setiap program prioritas memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian indikator kinerja utama daerah.

Penetapan program prioritas juga mempertimbangkan isu-isu strategis daerah, kebutuhan masyarakat, kapasitas fiskal, dan potensi sumber daya daerah, sehingga implementasinya bersifat fokus, terukur, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program prioritas dirancang untuk mendorong sinergi antarsektor dan antarwilayah dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, serta berbasis data dan bukti (evidence-based planning).

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah “Mewujudkan Rembang Sejahtera”, Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan pengelompokan program prioritas pembangunan tahun 2025–

2029 ke dalam lima prioritas utama. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah fokus intervensi kebijakan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Setiap kelompok program prioritas dirancang untuk menjawab isu-isu strategis daerah serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam dokumen RPJMD. Kelima kelompok prioritas Pembangunan tersebut adalah:

1. Peningkatan Pembangunan SDM
2. Peningkatan Perekonomian Daerah
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Peningkatan Infrastruktur Mantap
5. Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup

### **2.2.3. Isu Strategis**

Isu strategis perangkat daerah merupakan tantangan dan potensi yang akan dihadapi oleh BPBD Kabupaten Rembang dalam lima tahun ke depan, yang perlu direspons melalui perencanaan strategis guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Identifikasi isu strategis dilakukan dengan memperhatikan:

- Permasalahan pelayanan perangkat daerah,
- Isu strategis lingkungan dinamis (global, nasional, dan regional), dan
- Potensi kewenangan yang dimiliki perangkat daerah.

#### **a. Permasalahan Perangkat Daerah**

1. Belum optimalnya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Belum optimalnya penanganan serta penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

#### **b. Isu Strategis Lingkungan Dinamis**

Isu lingkungan dinamis yang memengaruhi pelaksanaan urusan kebencanaan meliputi:

1. Global : Perubahan Iklim.
2. Nasional : Krisis Lingkungan.
3. Regional : Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana.

4. Lokal : Optimalisasi kualitas penanggulangan bencana

**c. Potensi Daerah dan Kewenangan Perangkat Daerah**

1. Kewenangan dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan respon darurat bencana.
2. Kewenangan dalam pencegahan, penanggulangan, serta penyelamatan kebakaran dan non kebakaran

**Tabel 2.13 Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	8
Kewenangan dalam mitigasi, kesiapsiagaan, respon darurat bencana	Rendahnya kapasitas daerah dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.	Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup Belum Optimal	Perubahan Iklim	Krisis Lingkungan	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Belum optimalnya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana
Penanganan kebakaran dan penyelamatan	Terbatasnya kapasitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam memberikan respons cepat dan efektif.					Belum optimalnya penanganan dan penyelamatan kebakaran

*Sumber: BPBD Kabupaten Rembang 2025*

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **3.1. Tujuan Renstra BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029**

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029. Secara hierarkis, Renstra BPBD merupakan dokumen turunan yang menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD dalam urusan penanggulangan bencana.

Visi RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029, yaitu “Mewujudkan Rembang Sejahtera”, menjadi dasar utama dalam penyusunan Renstra BPBD. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan taraf hidup secara ekonomi, tetapi juga mencakup terwujudnya rasa aman dan perlindungan dari risiko bencana dan kebakaran. Tingginya risiko bencana dapat menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berdampak pada terganggunya pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengurangan risiko bencana merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

Renstra BPBD secara langsung mendukung Misi ke-5 RPJMD, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Urusan penanggulangan bencana memiliki keterkaitan erat dengan kondisi lingkungan hidup, tata ruang, serta pengelolaan sumber daya alam. Kerusakan lingkungan dan kurang optimalnya upaya mitigasi dapat meningkatkan potensi dan dampak bencana. Dalam konteks tersebut, BPBD berperan dalam penyelenggaraan pencegahan dan mitigasi bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan sistem kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Tujuan Pemerintah Daerah dalam mendukung misi tersebut adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan salah satu sasaran meningkatnya ketahanan bencana daerah. Sasaran ini menjadi ruang lingkup utama BPBD. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan Renstra BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 adalah menurunnya tingkat risiko bencana dan kebakaran. Tujuan ini merupakan bentuk operasionalisasi sasaran RPJMD pada tingkat perangkat daerah dan menjadi kontribusi konkret BPBD dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah.

Sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, indikator yang digunakan adalah Indeks Risiko Bencana (IRB). Indeks Risiko Bencana

mencerminkan tingkat risiko suatu wilayah berdasarkan komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Penurunan nilai Indeks Risiko Bencana menunjukkan adanya peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola ancaman bencana, berkurangnya tingkat kerentanan, serta meningkatnya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Dengan demikian, penurunan Indeks Risiko Bencana menjadi indikator kinerja utama dalam mengukur keberhasilan BPBD dalam menurunkan tingkat risiko bencana dan kebakaran di Kabupaten Rembang.

### **3.2. Sasaran Renstra BPBD Kabupaten Rembang tahun 2025-2029**

Terdapat tiga sasaran utama yang menjadi arah pembangunan dalam bidang penanggulangan bencana dan pelayanan kebakaran. Ketiga sasaran tersebut dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan penurunan risiko bencana serta peningkatan kualitas pelayanan penyelamatan terhadap kejadian darurat, baik kebakaran maupun non kebakaran.

Sasaran pertama adalah meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Nilai IKD merefleksikan kemampuan suatu daerah dalam mengelola risiko bencana melalui langkah-langkah preventif, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan yang terencana dan berkelanjutan.

Sasaran kedua adalah meningkatnya pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran. Ukuran keberhasilannya dilihat dari persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran berdasarkan waktu tanggap (*response time*). Indikator ini menunjukkan efektivitas dan kecepatan tim penyelamat dalam merespons kejadian, yang secara langsung berpengaruh terhadap tingkat keselamatan jiwa, aset, dan lingkungan masyarakat terdampak.

Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan pengendalian kinerja perangkat daerah BPBD Kabupaten Rembang. Sasaran ini mencerminkan upaya penguatan tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kinerja dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pelayanan penyelamatan. Keberhasilan sasaran ini diukur melalui beberapa indikator, yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPBD, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan BPBD, serta Indeks Manajemen Risiko BPBD. Ketiga indikator tersebut menggambarkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja organisasi, tingkat kepuasan mas

yarakat terhadap pelayanan yang diberikan, serta efektivitas penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD.

**Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029**

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Tahun						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya risiko bencana dan kebakaran		Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	114,24	110,74-110,18	109,28-108,49	107,82-106,80	106,36-105,11	104,91-103,42	103,45-101,73	-
		Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	-
Permendagri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota												-

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Tahun						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029		Meningkatnya pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran (Response Time Pelayanan Kebakaran)	Persen	45%	45,5%	46%	46,5%	47%	47,5%	48%	-

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Tahun						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Rembang	Nilai SAKIP BPBD	Angka	70,40	70,55	70,70	70,85	71,00	71,15	71,30	-
			Indeks Kepuasan Masyarakat BPBD	Angka	93,16	92,61	93,21	93,71	94,16	94,3	95,2	-
			Indeks Manajemen Risiko BPBD	Angka	NA	2,625	2,705	2,785	2,868	2,953	3,04	-

*Sumber: BPBD Kabupaten Rembang 2025*

### 3.3. Strategi Perangkat Daerah

Peningkatan efektivitas penanggulangan bencana memerlukan strategi yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi disusun sebagai bentuk implementasi tujuan pembangunan di bidang kebencanaan serta untuk mendukung terbentuknya sistem manajemen bencana yang responsif, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika risiko di daerah. Adapun beberapa strategi yang diterapkan antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui Destana dan Kencana;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, advokasi, kerjasama dan kemitraan dalam rangka penanggulangan bencana serta penyelamatan kebakaran dan non kebakaran;
3. Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kemandirian penanggulangan bencana serta penyelamatan kebakaran dan non kebakaran;
4. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana serta penyelamatan kebakaran dan non kebakaran;
5. Menyusun dokumen perencanaan atau kajian ilmiah penanggulangan bencana dan penyelamatan kebakaran.

**Tabel 3.2 Penahapan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Peningkatan kualitas ketahanan daerah terhadap bencana serta pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Pengembangan kualitas ketahanan daerah terhadap bencana serta pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Penguatan kualitas ketahanan daerah terhadap bencana serta pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Pemantapan kualitas ketahanan daerah terhadap bencana serta pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Perwujudan kualitas ketahanan daerah terhadap bencana serta pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran

### 3.4. Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Rembang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029

Arah kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan strategi penanggulangan bencana menitikberatkan pada dua fokus utama sebagai dasar penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana. Arah kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan strategi adalah:

Peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana dengan mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antar perangkat daerah, pemerintah desa dan dunia usaha/swasta serta organisasi kemasyarakatan lainnya dalam

rangka penanggulangan bencana serta peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kemandirian penanggulangan bencana.

Peningkatan pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran dengan mengoptimalkan kelembagaan dan relawan kebakaran dan non kebakaran di tingkat daerah hingga di tingkat desa/kelurahan dalam rangka pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran serta peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kemandirian penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

**Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra BPBD Kabupaten Rembang**

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
1	Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana melalui peningkatan kualitas SDM, penyediaan sarana prasarana kebencanaan, dan penguatan sistem peringatan dini (early warning system) untuk bencana pesisir (abrasi, intrusi air laut), kekeringan, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan/lahan.</li> <li>2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengumpulan, pemetaan, dan analisis risiko bencana berbasis wilayah guna mendukung perencanaan mitigasi yang tepat sasaran.</li> <li>3. Peningkatan peran serta masyarakat, relawan, dan dunia usaha dalam mitigasi dan kesiapsiagaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana</b> dilakukan dengan mengoptimalkan kerja sama dan kemitraan antar perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha/swasta, serta organisasi kemasyarakatan. Upaya ini juga didukung melalui peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat guna mendorong kemandirian dalam penanggulangan bencana.</li> <li>2. <b>Penerapan kebijakan responsif gender dalam penanggulangan bencana</b>, dengan memastikan perencanaan dan pelaksanaan program memperhatikan kebutuhan serta kerentanan perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia, dan</li> </ol>	

		<p>bencana, termasuk di wilayah pesisir dan daerah rawan kekeringan.</p> <p>4. Integrasi program sekolah tangguh bencana dan desa tangguh bencana untuk membangun budaya siaga dan tanggap bencana di seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>5. Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pengurangan risiko bencana melalui perencanaan terpadu, simulasi bersama, dan mobilisasi sumber daya saat darurat.</p>	<p>kelompok rentan lainnya, sehingga seluruh masyarakat memperoleh akses, partisipasi, dan perlindungan yang setara dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.</p>
2	<p>Permendagri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana melalui peningkatan kualitas SDM, penyediaan sarana prasarana kebencanaan, dan penguatan sistem peringatan dini (early warning system) untuk bencana pesisir (abrasi, intrusi air laut), kekeringan, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan/lahan.</p>	<p>1. <b>Peningkatan pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran</b> dilakukan dengan mengoptimalkan kelembagaan serta peran relawan kebakaran dan non kebakaran dari tingkat daerah hingga desa/kelurahan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan penyelamatan.</p> <p>2. <b>Penerapan kebijakan responsif gender dalam pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran</b>, dengan memastikan bahwa pelayanan, sosialisasi, dan edukasi memperhatikan kebutuhan serta kerentanan perempuan, laki-</p>

			laki, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya, sehingga seluruh masyarakat memperoleh akses pelayanan penyelamatan secara setara dan inklusif.	
--	--	--	---	--

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu- isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang dalam menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan ini telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Mempedomani peraturan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang dalam perencanaan tahun 2025 – 2029 akan melaksanakan 2 program, 16 kegiatan, dan 67 sub kegiatan .

Program dan kegiatan dalam rencana strategis 2025–2029 disusun untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas daerah (IKD) dan memperkuat ketahanan daerah, sehingga diharapkan bisa menurunkan risiko bencana (IRB), yang merupakan salah satu indikator keberhasilan daerah.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Rembang sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah organisasi. Program tersebut merupakan program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
  - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - h. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - f. Penyediaan Bahan/Material
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pengadaan Mebel
  - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  
- b. Program Penanggulangan Bencana
  1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
    - a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
    - b. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
  
  2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
    - a. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
    - b. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
    - c. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
    - d. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
    - e. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
    - f. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
    - g. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
    - h. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
    - i. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

- j. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
    - a. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
    - b. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
    - c. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
    - d. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
    - e. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
  4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
    - a. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
- c. Program Pencegahan Penanggulangan penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - b. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
    - c. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
    - d. Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
    - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
    - f. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
    - g. Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga
  2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
    - a. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
  3. Investigasi Kejadian Kebakaran

- a. Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
    - a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
    - b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
5. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
    - a. Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
    - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Secara rinci Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program BPBD Rembang BPBD Kabupaten Rembang tercantum pada table berikut.

**Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BPBD Kabupaten Rembang**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis	Menurunnya risiko bencana dan kebakaran				Indeks Risiko Bencana (IRB)		
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana			Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		
Permendagri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota			Meningkatnya penanggulangan dan penanganan bencana		1. Persentase Desa Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana 2. Persentase Kecamatan Tangguh Bencana 3. Persentase Penanganan Kejadian Bencana	Program Penanggulangan Bencana	
					Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya.	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
				Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029				(KRB) yang sah dan legal.	dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		
					Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota.	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga, dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota.	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
				Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana.	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
				Terlaksananya penguatan	Jumlah kawasan rawan	Penguatan Kapasitas	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
				kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.	bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
				Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRCPB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana.	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal.	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota	
				Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal.	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
				Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
				prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.			
				Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal.	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pelatihan pencegahan dan mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota.	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
					Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
				Terlaksananya koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah prioritas.	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
				Terlaksananya respon cepat darurat bencana penanganan awal untuk penetapan status darurat bencana paling lama 1 x 24 jam.	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya upaya untuk menemukan, menolong, maupun memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman.	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terdistribusinya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pengerahan dan pengorganisasian komando penanganan darurat bencana tingkat Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
					Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
				Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal.	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
		Meningkatnya pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran				Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran (Response Time Pelayanan Kebakaran)	
		Meningkatnya cakupan layanan pencegahan, penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan			1. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Damkar 2. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kab. Rembang	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			Penyelamatan Non Kebakaran				
					Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket dan penyelamatan/evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
				Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
				Tersedianya dokumen kajian Rencana Induk	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
				Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang sah dan legal.	Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
				Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait.	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
				Tersedianya dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan non kebakaran.	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				Terlaksananya pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga.	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	
					Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
				Tersedianya dokumen yang memuat data bangunan gedung lingkungan yang memenuhi kelaikan standar sarana prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
				proteksi kebakaran.			
					Persentase Kejadian Kebakaran yang Diinvestigasi	Investigasi Kejadian Kebakaran	
				Tersedianya dokumen yang memuat hasil investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran.	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
					Persentase anggota masyarakat yang terlatih	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
				Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat setiap tahunnya.	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
				Tersedianya dokumen pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran di desa dan kelurahan setiap tahunnya.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
					Persentase Penanganan Kejadian Kondisi Membahayakan Manusia oleh Pemadam Kebakaran	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
				Terlaksananya pembinaan aparatur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal.	dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
				Tersedianya sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal sesuai standar teknis.	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Rembang	Meningkatnya Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah		1. Nilai SAKIP BPBD 2. Indeks Kepuasan Masyarakat BPBD 3. Indeks Manajemen Risiko BPBD		
					Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah dengan kualitas baik	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				daerah.		Daerah	
				Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD.	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD.	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD serta laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya forum	Jumlah Berita Acara Hasil	Pelaksanaan Forum	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
				perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.	Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersampainya dokumen laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlaksananya layanan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	Persentase layanan Pengelolaan Kepegawaian yang Dilaksanakan Tepat Waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai.	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terpenuhinya pelayanan	Persentase Pemenuhan	Administrasi Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				umum perangkat daerah	Pelayanan Umum	Perangkat Daerah	
				Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya peralatan rumah tangga.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya bahan logistik kantor.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya bahan/material.	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD.	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan.	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya mebel.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya peralatan	Jumlah Unit Peralatan dan	Pengadaan Peralatan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				dan mesin lainnya.	Mesin Lainnya yang Disediakan	Mesin Lainnya	
				Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya.	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya pelayanan jasa penunjang perkantoran perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terkelolanya BMD dengan baik	Persentase BMD dengan Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
				dinas jabatan.		Dinas Jabatan	
				Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

**Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)	
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>					8.500.00 0.000		11.200.00 0.000		11.627.00 0.000		12.935.00 0.000		13.962.00 0.000		13.962.00 0.000	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYRAKAT</b>					8.500.00 0.000		11.200.00 0.000		11.627.00 0.000		12.935.00 0.000		13.962.00 0.000		13.962.00 0.000	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					6.700.00 0.000		9.000.000 .000		9.227.000 .000		10.335.00 0.000		11.162.00 0.000		11.162.00 0.000	
<b>Meningkatnya Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah</b>	%	NA	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.000.00 0		60.000.00 0		60.000.00 0		60.000.00 0		75.000.00 0		75.000.00 0	
Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah dengan kualitas baik	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	%	NA	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		10.000.00 0		10.000.00 0	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)	
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	NA	2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		3 dok		3 dok		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	NA	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	NA	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					2.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD.	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	NA	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)	
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					2.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD.	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	NA	1 dok			1 dok			1 dok			1 dok			1 dok
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD serta laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	NA	1 lap			1 lap			1 lap			1 lap			1 lap
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	NA	5 lap			5 lap			5 lap			5 lap			5 lap

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.		
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)			
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		20.000.000		20.000.000			
Terlaksananya forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BA	NA	1 BA			1 BA		1 BA				1 BA		2 BA		2 BA	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.405.000.000		6.830.000.000		7.007.000.000		7.665.000.000		7.997.000.000		7.997.000.000			
Tersampainya dokumen laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	%	100%	100%			100%		100%			100%		100%				

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)	
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.303.000.000		6.675.000.000		6.852.000.000		7.460.000.000		7.742.000.000		7.742.000.000	
Tersedianya gaji dan tunjangan ASN.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	55 orang	71 Orang		73 Orang		75 Orang		77 Orang		79 Orang		79 Orang		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					100.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000	
Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	12 dok	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	NA	1 lap		1 lap		1 lap		1 lap		1 lap		1 lap		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					17.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)	
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terlaksananya layanan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	Persentase layanan Pengelolaan Kepegawaian yang Dilaksanakan Tepat Waktu	%	NA	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					2.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai.	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok	NA	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					15.000.00 0		15.000.00 0		15.000.00 0		15.000.00 0		15.000.00 0		15.000.00 0	
Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	NA	25 pkt		25 pkt		25 pkt		25 pkt		25 pkt		25 pkt		
Administrasi Umum Perangkat Daerah					247.000.0 00		425.000.0 00		425.000.0 00		475.000.0 00		505.000.0 00		505.000.0 00	
Terpenuhinya pelayanan umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000		20.000.00 0		20.000.00 0		20.000.00 0		25.000.00 0		25.000.00 0	
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12 pkt	1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)	
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					40.000.00 0		100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00	
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	NA	1 pkt			1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					15.000.00 0		30.000.00 0		30.000.00 0		30.000.00 0		35.000.00 0		35.000.00 0	
Tersedianya peralatan rumah tangga.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12 pkt	1 pkt			1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					40.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0	
Tersedianya bahan logistik kantor.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12 pkt	1 pkt			1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					20.000.00 0		30.000.00 0		30.000.00 0		30.000.00 0		30.000.00 0		30.000.00 0	
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12 pkt	1 pkt			1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt	
Penyediaan Bahan/Material					25.000.00 0		40.000.00 0		40.000.00 0		40.000.00 0		40.000.00 0		40.000.00 0	
Tersedianya bahan/material.	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12 pkt	1 pkt			1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100.000.0 00		150.000.0 00		150.000.0 00		200.000.0 00		220.000.0 00		220.000.0 00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)	
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 lap	12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD.	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Paket	NA	1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		1 pkt		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					505.000.000		870.000.000		870.000.000		1.020.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	
Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	NA	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					100.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan.	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	NA	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		
Pengadaan Mebel					35.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		100.000.000		100.000.000	
Tersedianya mebel.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	NA	7 unit		14 unit		14 unit		14 unit		20 unit		20 unit		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					70.000.000		150.000.000		150.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)	
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tersedianya peralatan dan mesin lainnya.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	NA	4 unit		8 unit		8 unit		10 unit		12 unit		12 unit		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000	
Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya.	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	NA	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		2 unit		1 unit		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					150.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000	
Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	NA	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					321.000.000		435.000.000		485.000.000		635.000.000		785.000.000		785.000.000	
Terpenuhinya pelayanan jasa penunjang perkantoran perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 lap	12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.	
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					150.000.0 00		200.000.0 00		200.000.0 00		300.000.0 00		400.000.0 00		400.000.0 00		
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapor an	12 lap	12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5.000.000		30.000.00 0		30.000.00 0		30.000.00 0		30.000.00 0		30.000.00 0		
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lapor an	12 lap	12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					164.000.0 00		200.000.0 00		250.000.0 00		300.000.0 00		350.000.0 00		350.000.0 00		
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapor an	12 lap	12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					185.000.0 00		360.000.0 00		360.000.0 00		460.000.0 00		580.000.0 00		580.000.0 00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)	
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terkelolanya BMD dengan baik	Persentase BMD dengan Kondisi Baik	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					100.000.000		200.000.000		200.000.000		300.000.000		400.000.000		400.000.000	
Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8 Unit	48 unit		49 unit		50 unit		51 unit		52 unit		52 unit		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					25.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	45 unit	20 unit		20 unit		20 unit		20 unit		30 unit		40 unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)	
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	NA	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	NA	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>					<b>1.100.000.000</b>		<b>1.200.000.000</b>		<b>1.300.000.000</b>		<b>1.400.000.000</b>		<b>1.500.000.000</b>		<b>1.500.000.000</b>	
Meningkatnya penanggulangan dan penanganan bencana	<b>Persentase Desa Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana</b>		24,59	20,10		30,15		45,23		70,35		100,00		100,00		
	<b>Persentase Kecamatan Tangguh Bencana</b>		NA	21,43		50,00		71,43		85,71		100,00		100,00		
	<b>Persentase Penanganan Kejadian Bencana</b>		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)	
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000		100.000.000		200.000.000	
	Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya.	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	NA	37.500 Org		75.000 Org		112.500 Org		187.500 Org		221.250 Org		221.250 Org		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)	
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota					-		-				100.000.000,00	-	-		-	
Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang sah dan legal.	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Doku men	1 dok	-		-		-		1 Dok		-	-	-		
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					690.000.000		790.000.000		890.000.000		890.000.000		1.090.000.000		990.000.000	
	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota.	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota	Kegiat an	NA	4 kegiat an		4 kegiat an		4 kegiat an		4 kegiat an		4 kegiat an		4 kegiat an		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.	
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	yang tertangani																
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota					100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00		
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga, dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota.	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	NA	5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit	
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota					75.000.00 0		75.000.00 0		75.000.00 0		75.000.00 0		75.000.00 0		75.000.00 0		75.000.00 0
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana.	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis	Orang	NA	150 org		150 org		150 org		150 org		150 org		150 org		150 org	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.	
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	ancaman) Kabupaten/Kota																
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana					100.000.0 00		200.000.0 00		300.000.0 00		300.000.0 00		500.000.0 00		400.000.0 00		
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan- kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawas an	30 kawas an	43 kawas an		67 kawas an		100 kawas an		152 kwas an		213 kawas an		213 kawas an			
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota					50.000.00 0		50.000.00 0		150.000.0 00		150.000.0 00		150.000.0 00		150.000.0 00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)	
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRCPB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana.	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	400 org	100 org		100 org		200 org		200 org		200 org		200 org		
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota					100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00	
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal.	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Doku men	NA	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana					100.000.0 00		100.000.0 00		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)	
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal.	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Doku men	NA	1 dok		1 dok		-		-		-		-		
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota					50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0		50.000.00 0	
Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Lapor an	NA	12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					20.000.00 0		20.000.00 0		20.000.00 0		20.000.00 0		20.000.00 0		20.000.00 0	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)	
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal.	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Doku men	NA	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota					75.000.00 0		75.000.00 0		75.000.00 0		75.000.00 0		75.000.00 0		75.000.00 0	
Terlaksananya pelatihan pencegahan dan mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota.	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawas an	NA	2 kawa san		2 kawa san		2 kawa san		2 kawa san		2 kawa san		2 kawa san		
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					220.000.0 00		220.000.0 00		220.000.0 00		220.000.0 00		220.000.0 00		220.000.0 00	
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)	
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah prioritas.	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Lap	NA	1 lap			1 lap			1 lap			1 lap			1 lap
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya respon cepat darurat bencana penanganan awal untuk penetapan status darurat bencana paling lama 1 x 24 jam.	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Doku men	NA	1 dok			1 dok			1 dok			1 dok			1 dok
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya upaya untuk menemukan, menolong, maupun memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman.	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	NA	500 org			500 org			500 org			500 org			500 org

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)	
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terdistribusinya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	50 org	200 org		200 org		200 org		200 org		200 org		200 org		
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya pengerahan dan pengorganisasian komando penanganan darurat bencana tingkat Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	NA	2 lap		2 lap		2 lap		2 lap		2 lap		2 lap		
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000	
	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)	
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota					90.000.000		90.000.000	1 dok	90.000.000	1 dok	90.000.000	1 dok	90.000.000	1 dok	90.000.000	
Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal.	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Doku men	3 dok	1 dok			1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok	
<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>					<b>700.000. 000</b>		<b>1.000.000 .000</b>		<b>1.100.000 .000</b>		<b>1.200.000 .000</b>		<b>1.300.000 .000</b>		<b>1.300.000 .000</b>	
<b>Meningkatnya cakupan layanan pencegahan, penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Damkar</b>		16,67	33,3		50,0		66,7		83,3		100,0		100,0		
	<b>Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kab. Rembang</b>		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)	
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					418.000.000		600.000.000		550.000.000		590.000.000		700.000.000		700.000.000	
	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000		40.000.000		40.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000	
Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1 lap	12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)	
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran					18.000.00 0		30.000.00 0	1 dok	30.000.00 0	1 dok	30.000.00 0	1 dok	30.000.00 0	1 dok	30.000.00 0	
Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket dan penyelamatan/evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Doku men	1 dok	1 dok				1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran					50.000.00 0		100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00		200.000.0 00		200.000.0 00	
Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	NA	15 org			30 org		30 org		30 org		30 org		30 org	
Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)					100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00		100.000.0 00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)	
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tersedianya dokumen kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang sah dan legal.	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Doku men	NA	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri					200.000.0 00		300.000.0 00		250.000.0 00		300.000.0 00		300.000.0 00		300.000.0 00	
Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait.	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					10.000.00 0		10.000.00 0		10.000.00 0		10.000.00 0		10.000.00 0		10.000.00 0	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)	
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tersedianya dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan non kebakaran.	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Doku men	NA	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		
Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga					20.000.00 0		20.000.00 0		20.000.00 0		20.000.00 0		20.000.00 0		20.000.00 0	
Terlaksananya pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga.	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Kelua rga	NA	15 kelua rga		15 kelua rga		15 kelua rga		15 kelua rga		15 kelua rga		15 kelua rga		
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					10.000.00 0		10.000.00 0		20.000.00 0		20.000.00 0		20.000.00 0		20.000.00 0	
	Proteksi lokasi sasaran yang dilakukan inspeksi	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					10.000.00 0		10.000.00 0		20.000.00 0		20.000.00 0		20.000.00 0		20.000.00 0	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)	
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tersedianya dokumen yang memuat data bangunan gedung lingkungan yang memenuhi kelaikan standar sarana prasarana proteksi kebakaran.	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Doku men	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		
Investigasi Kejadian Kebakaran					12.000.00 0		40.000.00 0		30.000.00 0		40.000.00 0		30.000.00 0		30.000.00 0	
	Persentase Kejadian Kebakaran yang Diinvestigasi	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran					12.000.00 0		40.000.00 0		30.000.00 0		40.000.00 0		30.000.00 0		30.000.00 0	
Tersedianya dokumen yang memuat hasil investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran.	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Doku men	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					200.000.0 00		200.000.0 00		300.000.0 00		300.000.0 00		300.000.0 00		300.000.0 00	
	Persentase anggota masyarakat yang terlatih	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)	
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat					100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat setiap tahunnya.	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	210 org	200 org		200 org		250 org		250 org		250 org		250 org		
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran					100.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Tersedianya dokumen pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran di desa dan kelurahan setiap tahunnya.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa	NA	15 desa		15 desa		15 desa		15 desa		15 desa		15 desa		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ke t.
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)	
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia					60.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
	Persentase Penanganan Kejadian Kondisi Membahayakan Manusia oleh Pemadam Kebakaran	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi					10.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	NA	4 lap		4 lap		4 lap		4 lap		4 lap		4 lap		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi					50.000.000		100.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATU AN	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.	
				2026		2027		2028		2029		2030		TAR GET	PAGU (Juta)		
				TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Tersedianya sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal sesuai standar teknis.	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	NA	4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit			

**Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1.	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya penanggulangan dan penanganan bencana		
			<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	SPM
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	SPM
			<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	SPM
			Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	SPM
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	SPM
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	SPM
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	SPM
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	SPM
			<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	SPM
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SPM
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	SPM
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	SPM
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya cakupan layanan pencegahan, penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		

			<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	SPM
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
			Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
			Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	
			<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	SPM
			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
			<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	SPM
			Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
			<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	SPM
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
			<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	SPM
			Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	

#### 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Rembang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 merupakan indikator kinerja BPBD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Rembang**

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra	Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,71	
2	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran (Response Time Pelayanan Kebakaran)	Persen	45,5%	46%	46,5%	47%	47,5%	48%	48%	
3	Nilai SAKIP BPBD	Angka	70,55	70,7	70,85	71,0	71,15	71,3	71,3	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPBD	Angka	92,61	93,21	93,71	94,16	94,3	95,2	95,2	
5	Manajemen Risiko Indeks (MRI) BPBD	Angka	2,625	2,705	2,785	2,868	2,953	3,040	3,040	

Sumber: RPJMD Kabupaten Rembang 2025-2029

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci BPBD Kabupaten Rembang**

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Ahir Periode Renstra	Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	100	100	100	100	100	100	100	
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	Orang	100	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15	

Sumber: RPJMD Kabupaten Rembang 2025-2029

**Tabel 4.6 Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Rembang**

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Ahir Periode Renstra	Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Indeks Risiko Bencana (IUP 55)	Angka	110,74 -	109,28 -	107,82 -	106,36 -	104,91 -	103,45 -	103,45 -	
			110,18	108,49	106,80	105,11	103,42	101,73	101,73	

Sumber:RPJPD Kab. Rembang th. 2025-2045 dan RPJMD Kab. Rembang th. 2025-2029

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, serta program pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana. Dokumen ini menjadi acuan bagi BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara terarah, terpadu, efektif, dan akuntabel guna mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang komprehensif di Kabupaten Rembang.

Renstra BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 merupakan hasil proses perencanaan strategis yang memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Rembang, kebijakan nasional di bidang penanggulangan bencana, serta kondisi dan potensi kerawanan bencana yang ada di wilayah Kabupaten Rembang. Dokumen ini juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas pelayanan publik, serta sinergi antar pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD setiap tahun, sehingga pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dapat berjalan secara terarah, terintegrasi, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran aparatur BPBD, dukungan Pemerintah Kabupaten Rembang, koordinasi lintas perangkat daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sebagai penutup, pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 diharapkan mampu memperkuat sistem penanggulangan bencana yang responsif, terpadu, dan berkelanjutan sehingga dapat meminimalkan risiko bencana serta melindungi keselamatan masyarakat, lingkungan, dan aset pembangunan di Kabupaten Rembang.

Dengan demikian, BPBD Kabupaten Rembang berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka mewujudkan daerah yang tangguh terhadap bencana serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah Kabupaten Rembang.

### **5.1. Kaidah Pelaksanaan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Renstra ini disusun sebagai dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh jajaran BPBD Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penanggulangan bencana,

sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah.

Pelaksanaan penyusunan Renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029. Selain itu, proses penyusunannya juga memperhatikan keselarasan dengan kebijakan nasional dan provinsi di bidang penanggulangan bencana serta arah pembangunan daerah Kabupaten Rembang, sehingga program dan kegiatan BPBD dapat berkontribusi dalam mewujudkan daerah yang tangguh terhadap bencana.

Proses penyusunan Renstra dilakukan melalui beberapa tahapan penting, yaitu:

1. Analisis kondisi internal dan eksternal organisasi untuk mengidentifikasi potensi, permasalahan, serta tantangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang.
2. Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan BPBD yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah serta kebijakan pembangunan daerah.
3. Penjabaran program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas di bidang penanggulangan bencana, termasuk indikator kinerja dan target capaian yang terukur.
4. Konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, khususnya Bappeda, guna menjamin konsistensi serta sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.
5. Penyusunan rancangan akhir Renstra yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Rembang selama periode perencanaan.

Kaidah pelaksanaan penyusunan Renstra ini juga menekankan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (result-based planning). Setiap tahapan pelaksanaan Renstra didukung oleh data dan informasi yang valid serta memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar dokumen ini dapat dilaksanakan secara efektif.

Dengan berpedoman pada kaidah pelaksanaan tersebut, diharapkan Renstra BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengarahkan kebijakan, strategi, serta program penanggulangan bencana guna meningkatkan kesiapsiagaan daerah, mengurangi risiko bencana, serta melindungi masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Rembang.

## **5.2. Pengendalian dan Evaluasi**

Pengendalian pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan serta mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan melalui penjabaran dokumen Renstra ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) BPBD setiap tahun, penetapan indikator dan target kinerja, serta pemantauan secara berkala terhadap konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Selain itu, pengendalian juga mencakup identifikasi risiko dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana beserta upaya mitigasinya guna memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Evaluasi pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Rembang dilakukan secara periodik untuk menilai tingkat pencapaian tujuan, sasaran, serta target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dilaksanakan melalui pelaporan kinerja tahunan yang terintegrasi dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kabupaten Rembang, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BPBD, termasuk evaluasi triwulanan atas capaian kinerja program dan kegiatan. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya serta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah di masa yang akan datang.

## **5.3. Pedoman Transisi**

Pedoman transisi disusun sebagai acuan untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang pada masa peralihan antara berakhirnya periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 dengan awal periode Renstra berikutnya. Pedoman ini bertujuan menjaga stabilitas arah kebijakan serta memastikan tidak terjadinya kekosongan perencanaan pada tahun pertama periode pembangunan selanjutnya.

Meskipun Renstra BPBD Kabupaten Rembang ditetapkan untuk periode Tahun 2025–2029, dokumen ini juga memperhatikan arah kebijakan sampai dengan Tahun 2030 sebagai bagian dari strategi transisi agar capaian pembangunan dapat berlanjut secara berkesinambungan. Arah kebijakan transisi tersebut antara lain meliputi:

1. Pemantapan capaian kinerja penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan selama periode Tahun 2025–2029.

2. Penyempurnaan program dan kegiatan strategis yang masih memerlukan tindak lanjut pada tahun berikutnya.
3. Penyiapan data dan hasil evaluasi kinerja akhir periode sebagai dasar penyusunan Renstra BPBD periode selanjutnya.
4. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana agar transisi menuju periode perencanaan berikutnya dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan adanya pedoman transisi ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Rembang tetap berjalan secara terarah, konsisten, dan berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran BPBD serta dukungan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan daerah terhadap bencana serta mendukung pembangunan Kabupaten Rembang yang berkelanjutan.

Rembang, 15 Oktober 2025  
KEPALA PELAKSANA BPBD  
KABUPATEN REMBANG



**SRI JARWATI, M.Pd., MH.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660826 198806 2 001